

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam suatu negara diperlukan pembangunan yang merata, sehingga peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam menciptakan pembangunan tersebut. Pembangunan merupakan rencana perubahan dalam memperbaiki keadaan hidup golongan masyarakat di berbagai aspek. Agar pembangunan tercipta, pertumbuhan ekonomi perlu ditingkatkan dan kemiskinan harus dapat ditekan, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat (Marisa, 2019). Apabila pembangunan tercipta yang disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat maka, masalah kemiskinan di suatu negara mampu teratasi.

Kemiskinan merupakan masalah yang cukup rumit, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia, meskipun beberapa negara berkembang berhasil melakukan pembangunan dalam hal produksi dan pendapatan nasional (Sartika, Balaka, & Rumbia 2016). Di Pulau Jawa terdapat enam provinsi, di mana kemiskinan tertinggi berada di Jawa Timur dengan rata-rata 4.576,83 ribu jiwa selama tahun 2013-2020, sedangkan kemiskinan terendah terdapat di provinsi DKI Jakarta dengan rata-rata 352,99 ribu jiwa. Pemerintah masing-masing provinsi harus sesegera mungkin mencari solusi agar angka kemiskinan bisa teratasi. Tabel 1-1 menunjukkan perkembangan jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa tahun 2013-2020.

**Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin di Pulau Jawa Tahun 2013-2020 (Ribu Jiwa)**

<b>Tahun</b>	<b>DKI Jakarta</b>	<b>Jawa Barat</b>	<b>Jawa Tengah</b>	<b>DIY</b>	<b>Jawa Timur</b>	<b>Banten</b>
2013	371,70	4.375,20	4.811,30	541,95	4.893,00	677,50
2014	412,79	4.239,00	4.561,82	532,59	4.748,30	649,19
2015	398,92	4.435,70	4.577,00	550,23	4.789,12	702,40
2016	384,30	4.224,3	4.506,89	494,94	4.703,30	658,11
2017	389,69	4.168,44	4.450,72	488,53	4.617,01	675,04
2018	373,12	3.615,79	3.897,20	460,10	4.332,59	661,36
2019	365,55	3.399,16	3.743,23	448,47	4.112,25	654,46
2020	480,86	3.920,23	3.980,90	475,72	4.419,10	775,99

Sumber: BPS, diolah

Bedasarkan Tabel 1-1, nampak bahwa jumlah penduduk miskin di masing-masing wilayah provinsi di Pulau Jawa Tahun 2013-2020 cenderung berfluktuasi, dengan penduduk miskin tertinggi berada di Provinsi Jawa Timur. Terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 di semua provinsi yang mayoritas disebabkan oleh Covid-19 yang mematikan banyak usaha. Timbulnya kemiskinan juga dikarenakan rendahnya kemampuan masyarakat mengakses lapangan kerja dan sedikitnya peluang masyarakat untuk mendapat kesempatan kerja (Isnaini & Nugroho 2020). Secara umum, Indonesia sebagai negara berkembang masih memiliki jumlah penduduk miskin yang cenderung tinggi. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang akurat untuk mengetaskan masalah kemiskinan ini.

Salah satu faktor yang memengaruhi kemiskinan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menunjukkan tingginya kualitas sumber daya manusia yang akan berdampak pada meningkatnya produktivitas kerja yang nantinya akan memengaruhi perolehan pendapatan. Peningkatan pendapatan membuat masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga tingkat

kemiskinan dapat ditekan (Fadila & Marwan 2020). Tabel 1-2 menunjukkan perkembangan IPM di Pulau Jawa tahun 2013-2020.

**Tabel 1. 2 Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Jawa Tahun 2013-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Indeks Kesehatan</b>	<b>Indeks Pendidikan</b>	<b>Indeks Pengeluaran</b>	<b>IPM</b>
2013	0,80	0,63	0,74	71,30
2014	0,80	0,64	0,75	71,80
2015	0,80	0,64	0,75	72,47
2016	0,81	0,64	0,76	73,12
2017	0,81	0,65	0,77	73,64
2018	0,81	0,66	0,78	74,19
2019	0,81	0,66	0,79	74,74
2020	0,81	0,67	0,78	74,81

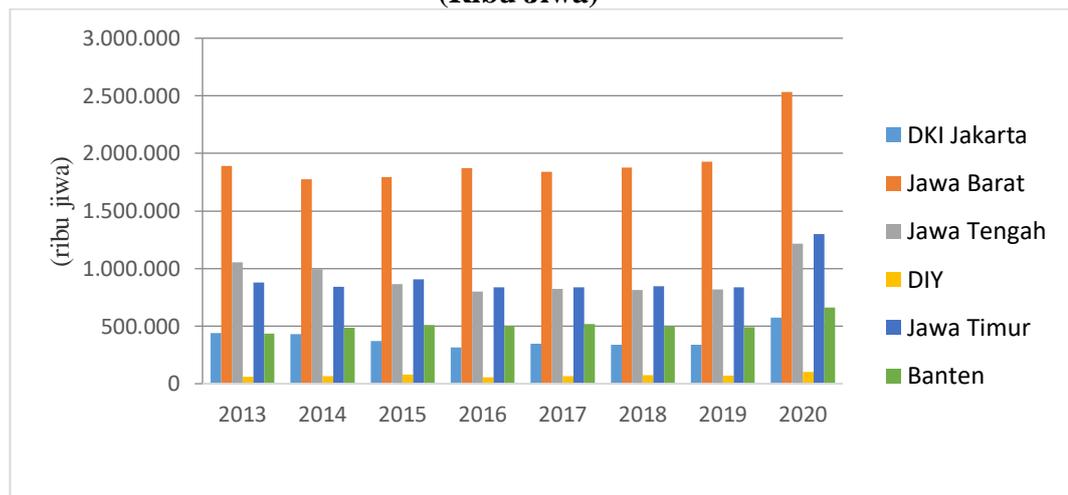
Sumber: BPS, diolah

Tabel 1-2 menunjukkan bahwa perkembangan IPM di Pulau Jawa Tahun 2013-2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya. IPM di Pulau Jawa tahun 2013-2020 ini berada pada kategori “tinggi” karena terletak di antara 70-80. Namun, angka IPM lebih dekat dengan 70 (sedang) daripada 80 (sangat tinggi). Selain itu, meski IPM pada tahun 2020 adalah yang tertinggi, jumlah penduduk miskin justru meningkat. Hal ini menandakan bahwa masih perlunya perhatian terhadap IPM agar mampu untuk menurunkan tingkat kemiskinan.

Selain IPM, faktor lain yang juga memengaruhi kemiskinan adalah pengangguran. Secara teoritis, menurut Arsyad (2010), terdapat hubungan yang erat antara pengangguran dengan kemiskinan. Hal tersebut disebabkan karena seseorang yang bekerja paruh waktu atau tidak bekerja termasuk dalam golongan masyarakat miskin, karena pendapatan yang diterima tergolong rendah. Tak hanya itu, masyarakat yang menganggur tidak memiliki upah atau pendapatan. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengangguran memiliki hubungan

positif terhadap kemiskinan, sehingga jika tingkat pengangguran relatif tinggi yang salah satunya diakibatkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan, kemiskinan cenderung meningkat. Grafik 1-1 menunjukkan perkembangan pengangguran di Pulau Jawa tahun 2013-2020.

**Grafik 1. 1 Perkembangan Pengangguran di Pulau Jawa Tahun 2013-2020 (Ribu Jiwa)**

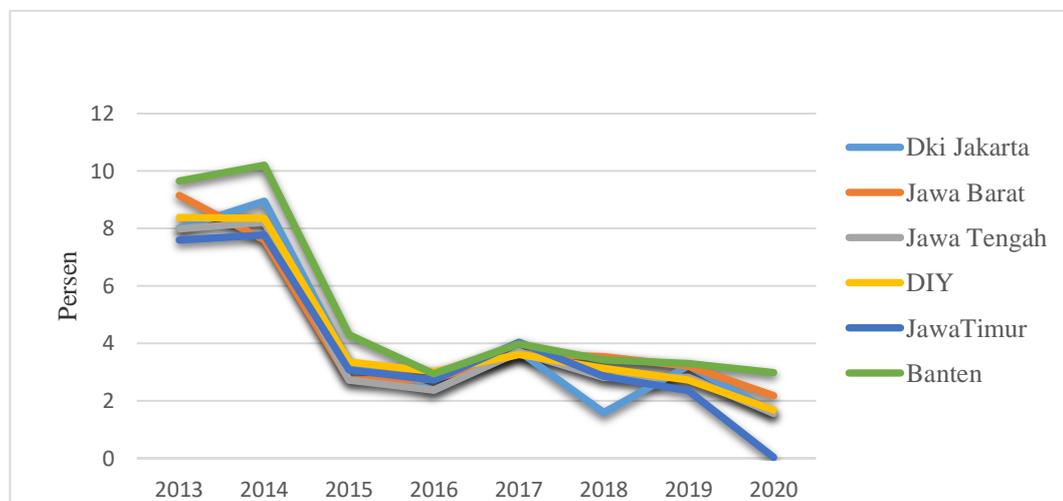


Sumber: BPS, diolah

Bedasarkan Grafik 1-1, terlihat bahwa pengangguran yang terjadi di masing-masing Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2013-2020 cenderung berfluktuasi meski kenaikan ataupun penurunannya tidak terlalu signifikan. Sama halnya dengan jumlah penduduk miskin, pada tahun 2020, jumlah pengangguran di semua provinsi meningkat karena banyak usaha yang bangkrut akibat pandemi Covid-19. Peningkatan pengangguran akan meningkatkan kemiskinan, karena orang yang menganggur tidak memiliki upah atau penghasilan. Salah satu faktor yang menentukan kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan, sehingga jika pendapatan masyarakat tinggi, maka kesejahteraan masyarakat juga akan tinggi, begitupun sebaliknya.

Salah satu faktor lain yang berkaitan erat dengan kemiskinan adalah inflasi. Menurut Hasyim (2017), inflasi adalah gejala ekonomi yang menunjukkan naiknya harga secara umum dan berkelanjutan. Apabila inflasi terjadi terus menerus, dikhawatirkan daya beli masyarakat akan berkurang. Pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan adanya perbaikan distribusi pendapatan mampu meningkatkan daya beli dan konsumsi per kapita, sehingga berdampak pada pengurangan jumlah penduduk miskin di suatu negara (Duwila, 2016). Grafik 1-2 menunjukkan perkembangan inflasi di Pulau Jawa tahun 2013-2020.

**Grafik 1. 2 Perkembangan Inflasi di Pulau Jawa Tahun 2013-2020 (%)**



Sumber: BPS, diolah

Bedasarkan Grafik 1-2, terlihat bahwa inflasi di Pulau Jawa Tahun 2013-2020 cenderung fluktuatif. Inflasi tertinggi terjadi di Provinsi Banten pada tahun 2014 sebesar 10,2%. Menurut Sukirno (2016), adakalanya tingkat inflasi meningkat dengan tiba-tiba atau wujud sebagai akibat suatu peristiwa tertentu yang berlaku di luar ekspektasi pemerintah, seperti efek dari depresiasi nilai uang yang sangat besar atau ketidakstabilan politik. Sementara itu, inflasi terendah terjadi di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 sebesar 0,46% yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah

seperti kebijakan fiskal dalam bentuk mengurangi pengeluaran untuk menjaga kestabilan ekonomi guna menurunkan tingkat inflasi tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi adalah meningkatkan kemakmuran masyarakat dan mengurangi masalah kemiskinan. Kemakmuran masyarakat dapat diukur dengan tingkat pendapatan masyarakat itu sendiri, terutama di negara berkembang termasuk di Indonesia. Masalah kemiskinan masih umum terjadi di Indonesia, karena tingginya populasi penduduk dan tingginya pertumbuhan angkatan kerja yang tidak diikuti dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan. Hal ini menyebabkan penduduk mengalami pengangguran dan tidak memperoleh pendapatan.

Akibat dari banyaknya masyarakat yang menganggur, kesehatan dan pendidikan menjadi rendah. Pendidikan dan kesehatan itu sendiri digunakan sebagai ukuran IPM suatu negara. Apabila tingkat kesehatan dan pendidikan masyarakat tinggi, maka nilai IPM suatu negara juga tinggi, dan sebaliknya. Di negara berkembang khususnya Indonesia, masih banyak masyarakat yang belum dapat mengakses fasilitas kesehatan maupun pendidikan yang layak, sehingga kualitas sumber daya manusia cenderung rendah.

Selain pengangguran dan IPM, faktor lain yang memengaruhi kemiskinan adalah inflasi. Di wilayah Pulau Jawa sempat terjadi inflasi yang sangat tinggi sebesar 10,2%. Namun kondisi ini tidak terjadi selamanya jika pemerintah menjalankan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk menurunkan tingkat inflasi. Berdasarkan permasalahan dan latar belakang masalah, maka perlu dilakukan

penelitian untuk mengetahui pengaruh IPM, pengangguran, dan inflasi terhadap kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2013-2020.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengestimasi arah dan besarnya pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Pulau Jawa pada tahun 2013-2020
2. Mengestimasi arah dan besarnya pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Pulau Jawa pada tahun 2013-2020
3. Mengestimasi arah dan besarnya pengaruh inflasi terhadap kemiskinan di Pulau Jawa pada tahun 2013-2020.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan solusi tentang kondisi kemiskinan kepada pemerintah khusus nya di Pulau Jawa serta pihak-pihak yang terkait untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan

2. Dinas tenaga kerja dan transmigrasi Provinsi di Pulau Jawa

Penelitian ini di harapkan menjadi pertimbangan maupun masukan dalam menentukan kebijakan dalam peningkatan tenaga kerja yang akan mendorong peningkatan pendapatan sehingga dapat memengaruhi kualitas hidup masyarakat. Mengevaluasi kinerja pemerintah sehingga dapat mendorong peningkatan pembangunan manusia.

### 3. Dinas pendidikan Provinsi di Pulau Jawa

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan dalam menentukan usaha-usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan mendirikan sekolah yang memiliki keunggulan dan mutu baik, fasilitas sekolah yang memadai dalam menunjang sistem kegiatan pendidikan, sehingga menciptakan sumber daya manusia yang dapat membantu dalam peningkatan pembangunan manusia.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan metode atau aturan dalam menyelesaikan sebuah penelitian yang dilakukan. Hal ini penting diperhatikan agar penelitian yang dihasilkan tersusun runtut. Penulisan secara sistematis menjadi lima bab, yaitu :

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan landasan teori yang menjelaskan pengaruh masing-masing IPM, pengangguran, dan inflasi terhadap kemiskinan. Kemudian, akan dijabarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang terkait. Di akhir bab ini akan dirumuskan hipotesis penelitian.

##### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, metode analisis data, serta analisis yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian.

#### BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil regresi, interpretasi koefisien regresi, dan interpretasi ekonomi.

#### BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran guna perbaikan dan referensi penelitian selanjutnya dalam pembahasan ruang lingkup yang sama.